

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini memuat pendahuluan yang diuraikan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dan juga akan dijelaskan gambaran umum terkait topik yang akan diteliti.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Sudan atau nama resminya yakni *Republic of Sudan* adalah suatu negara yang merupakan bekas negara jajahan Inggris yang merdeka pada 1 Januari 1956, negara Sudan berada di wilayah timur laut benua Afrika yang terletak diantara 4° dan 23° LU serta 22° dan 38° BT. Negara Sudan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.000.000 mil persegi yang dimana berbatasan langsung dengan wilayah Afrika Tengah dan sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Chad, lalu di bagian utara dengan negara Libya dan Mesir, sedangkan di bagian timur dengan negara Ethiopia dan Eritrea dan pada bagian selatan berbatasan dengan negara Kenya, Uganda, dan juga Kongo.

Lalu terdapat pula kota-kota besar yang berada di negara ini seperti Khartoum, Port Sudan, Omdurman, Juba, Wad Medani, dan Atbara. Negara ini memiliki jumlah populasi sebanyak 33 juta jiwa yang merupakan persatuan dari bermacam-macam suku dan etnis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Etnis Afrika kulit hitam 54%, Arab 40% dan lainnya 6%. Dari jumlah populasi yang telah disebutkan, dan juga etnis-etnis yang beragam, di negara ini terdapat pula berbagai macam agama seperti Islam sebesar 75%, Animis 20%, dan Nasrani 5% (CIA, The World Fact Book, 2019).

Dalam pembagian wilayahnya berdasarkan agama dan etnis penduduk dibagi menjadi dua wilayah, yakni Sudan Utara

dan Sudan Selatan. Keadaan penduduk di Sudan Utara mayoritas beragama Islam dari keturunan Arab dan sedangkan Sudan Selatan mayoritas beragama Nasrani dan Animisme keturunan Afrika. Penduduk Sudan hidup tidak dalam satu kesatuan wilayah, tetapi mereka terpecah dikarenakan faktor ketertarikan penduduk dalam berekspedisi yakni sekitar kurang lebih 10% sedangkan yang bermukim di kota-kota besar sebanyak 25%. Faktor lain yang menyebabkan fenomena ini terjadi dikarenakan perbedaan etnis, agama, gaya hidup hingga kebudayaan, dan mayoritas penduduk Sudan memiliki mata pencaharian yakni sebagai petani dan peternak (Hadi, 2006).

Pertikaian antara Sudan Utara dan Sudan Selatan ini memiliki latar belakang pengelompokan-pengelompokan yang terjadi di negara Sudan ini yang berdasarkan etnis dan juga agama yang dimana fenomena tersebut menjadi *entry point* atau mulainya perseteruan antar kedua belah pihak ini yang hingga saat ini masih terus berlangsung sehingga negara Sudan mengalami ketegangan dan kelemahan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi (Alo Liliweri, 2005).

Perang sipil pecah pertama kali pada tahun 1955 sampai tahun 1972. Faktor yang menjadi dasar terpecahnya perang sipil ini ialah karena pemerintahan wilayah utara didominasi oleh penduduk dari Sudan Utara saja. Perjanjian *Addis Ababa* menjadi penyebab gencatan senjata sementara pada perang sipil yang pertama ini. Perjanjian ini, merupakan hasil musyawarah dan perundingan antara pemerintah Sudan dan SPLM/A (*Sudan People Liberation Movement/Army*) pada Februari 1972 (Johnson, 2011). Isi dari *Addis Ababa* yakni adalah persatuan persepsi antara Sudan Utara dan Selatan dalam menghentikan konflik. Pasca kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian *Addis Ababa* ini, Negara Sudan merubah arah ideologi politiknya yang dimana pada saat itu Presiden Sudan yakni Jafaar Muhammad An-Numeiry (Miriam, 1977). Dan isi dari persetujuan ini yakni adalah sejumlah kewenangan bagi pihak Sudan Selatan dalam pembentukan badan legislatif dan juga eksekutif sendiri yang

terpisah dengan pemerintah pusat di Sudan Utara (Rumadi, 2001).

Era yang baru bagi Sudan Utara dan Selatan ini dapat terlihat pada saat perang sipil kedua berakhir. Faktor berakhirnya konflik ini atas dasar kesepakatan antara masyarakat dan pihak SPLM/A yang dimana mereka adalah tentara pejuang dari wilayah selatan dengan wakil presiden dari wilayah utara. Isi dari perjanjian tersebut meliputi:

1. Tindak lanjut dari pasukan militer dari setiap kubu
2. Otonomi daerah
3. Pembagian kekayaan minyak
4. Isu ekonomi
5. Administrasi
6. Hukum islam
7. Pilihan bagi rakyat Sudan, persatuan atau kemerdekaan.

Dan pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan berdasarkan hasil *referendum* yang dimana telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Januari. Penduduk wilayah selatan mayoritas menginginkan kemerdekaan dan memisahkan diri dari Sudan Utara yang berstatus sebagai pemerintah pusat Sudan dan memilih untuk mendirikan pemerintahannya sendiri di wilayah Sudan Selatan.

Pasca lepasnya negara Sudan Selatan ini, tentu membawa dampak bagi kedua belah pihak, khususnya Sudan dikarenakan sebagian besar kekayaan sumber daya minyak diambil oleh Sudan Selatan, kemudian masalah utama yakni ekonomi menjadi terpuruk disebabkan konflik berkepanjangan hingga sekarang, kondisi sosial masyarakat yang perlu diubah dan juga konflik antar etnis yang menyebabkan jutaan pengungsi dan korban jiwa. Dengan terciptanya masalah-masalah tersebut khususnya dalam bidang ekonomi menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti tentang Sudan pasca lepasnya Sudan selatan.

Ekonomi Sudan telah melonjak di belakang peningkatan produksi minyak, harga minyak yang tinggi, dan arus masuk besar investasi asing langsung hingga paruh kedua tahun 2002. Pertumbuhan PDB terdaftar lebih dari 10% per tahun pada tahun 2006 dan 2007. Dari tahun 1997 hingga Saat ini, Sudan telah bekerja dengan IMF untuk melaksanakan reformasi ekonomi makro, termasuk pelayaran terkendali dari nilai tukar. Sudan mulai mengekspor minyak mentah pada kuartal terakhir 1999.

Produksi pertanian tetap penting, karena mempekerjakan 80% tenaga kerja dan menyumbang sepertiga dari PDB. Konflik Darfur, setelah dua dekade perang saudara di selatan, kurangnya infrastruktur dasar di wilayah yang luas, dan ketergantungan oleh banyak penduduk pada pertanian subsisten memastikan sebagian besar penduduk akan tetap di atau di bawah garis kemiskinan untuk bertahun-tahun meskipun peningkatan cepat rata-rata per pendapatan modal. Pada Januari 2007, pemerintah memperkenalkan mata uang baru, Pound Sudan, pada nilai tukar awal \$ 1,00 sama dengan 2 Pound Sudan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan data yang didapat diatas, dalam peneltian ini penulis mengajukan rumusan masalah “Bagaimana upaya pemerintah Sudan dalam pemulihan ekonomi pasca lepasnya Sudan Selatan?”

C. Kerangka Berpikir

1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah suatu kerjasama yang dilakukan dalam memperjuangkan segala bentuk ancaman kedaulatan nasional, pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, persatuan nasional, penolakan terhadap hak-hak rakyat dalam menentukan nasib dan juga dalam hak setiap manusia untuk

melaksanakan kedaulatan atas kekayaan SDA nasional (Y, 2007).

Menurut **K. J. Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti, 1988):

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama ialah suatu fenomena interaksi antara aktor dalam hubungan internasional yang dalam prosesnya ini terdapat kepentingan-kepentingan setiap negara. Isu yang paling utama dalam halnya kerjasama internasional yakni dilandaskan pada sebesar mana keuntungan yang dapat dirasakan bersama bila diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral (Dougherty, 1986) . Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain:

- 1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*).
- 2) Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya (Rudy, 1993).

Konsep kerjasama fungsional merupakan konsep yang digunakan oleh pemerintah Sudan dalam mengatasi masalah negara dalam pemulihan ekonomi setelah lepasnya Sudan Selatan yang mengakibatkan krisis ekonomi Sudan. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kerjasama fungsional ini meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Maka konsep ini dapat diaplikasikan dengan fenomena krisis yang terjadi di Sudan, dan pemerintah Sudan telah menerapkan konsep kerjasama fungsional ini dalam strategi pemulihan ekonomi negaranya.

Contohnya yakni persekutuan antara Arab Saudi - UEA - Mesir yang dimana tercipta karena khawatir terhadap konflik yang di alami oleh Sudan karena konflik tersebut sama persis dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Negara-negara tersebut bersama telah membantu penguasa militer di Khartoum dengan bantuan keuangan senilai 3 Milyar Dolar AS atau sekitar Rp. 43 Triliun, yang dimana diharapkan untuk menopang mata uang Sudan dan juga dalam memberi bantuan dana untuk impor barang-barang kebutuhan pokok (Indonesia B. N., 2019) .

Kerjasama antara Arab Saudi – UEA – Mesir merupakan contoh bentuk interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional yang berbentuk kerjasama internasional. Setiap negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dan pasti memerlukan bantuan dari negara lain dan dalam mencapainya perlu adanya kerjasama internasional agar kepentingan dan kebutuhan nasional masing-masing negara terpenuhi.

2. Teori Modernisasi Berdasarkan Perspektif Liberalisme

Liberalis mempercayai bahwa interaksi ekonomi antarnegara itu bersifat saling menguntungkan dan harmonis. Menurut liberalisme, perekonomian dunia merupakan faktor yang menguntungkan bagi perkembangan

ekonomi sebuah negara. Interdependensi dan hubungan antara perekonomian negara yang maju dengan negara yang belum maju atau disebut LDC (*Less Developed Countries*) dapat mengurangi sebagian beban bagi negara-negara berkembang. Yakni, melalui perdagangan, bantuan internasional, dan investasi luar negeri, LDC memperoleh pasar ekspor, modal, dan teknologi yang dapat digunakan untuk perkembangan ekonomi. Liberalisme juga mempercayai bahwa interdependensi yang terjadi dalam perekonomian dunia didasarkan pada konsep perdagangan bebas (*free trade*), spesialisasi, dan *international division of labour*. (Gilpin, 1987)

Aliran modal, barang, serta teknologi meningkatkan optimalisasi efisiensi dalam alokasi sumber daya yang kemudian turut “menularkan” kemajuan di negara-negara Utara terhadap negara-negara berkembang di Selatan. Perdagangan merupakan elemen mesin pertumbuhan atau *engine of growth* yang dimana LDC mendapatkan aliran modal, barang, dan teknologi dari negara-negara maju. Negara maju pun memperoleh bahan mentah dengan harga murah yang sebagian besar menjadi sumber daya negara berkembang.

Teori modernisasi ini menerima tanpa kritik struktur hubungan antara negara kaya dan negara miskin. Dalam pandangan teori ini, *underdevelopment* merupakan hasil yang murni dari hubungan luar negeri negara itu sendiri. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Modernisasi juga merupakan proses sistematis yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi, dsb. (Gilpin, 1987)

Ciri-ciri pokok teori modernisasi:

1. Modernisasi merupakan proses bertahap.
2. Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi.

3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya, sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau modernisasi sama dengan Barat.
4. Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner, dan bukan perubahan revolusioner.

Implikasi kebijaksanaan pembangunan yang perlu diikuti Dunia Ketiga dalam usaha memodernisasikan dirinya:

1. Menjadikan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat sebagai model dan panutan.
2. Menyarankan pembangunan ekonomi, meninggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional, dan melembagakan demokrasi politik.
3. Memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, melalui investasi produktif dan pengenalan nilai-nilai modern.

D. Hipotesa

Strategi pemerintah Sudan dalam pemulihan ekonomi di Sudan adalah:

1. Melakukan upaya-upaya kerjasama internasional dengan Indonesia dalam sektor agrikultur dan transportasi untuk memulihkan ekonomi negara.
2. Pemerintah Sudan melakukan kerjasama dengan Qatar dan Turki dalam sektor pembangunan infrastruktur.

E. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis berfokus pada data antara tahun 2010-2019 dengan alasan:

1. Pada tahun 2010 berakhirnya konflik di Darfur dengan terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh Presiden

Omar Al-Bashir dengan Jem yakni pemberontak utama di Darfur dalam mencapai perdamaian penuh.

2. Pada 2019 Militer berhasil melengserkan Presiden Omar Bashir atas permintaan rakyat Sudan, maka dibentuklah Dewan Transisi Militer dan juga Dewan Kedaulatan Sipil untuk menggantikan posisi pemerintah dalam mengatasi krisis. Dan pada masa ini beberapa negara seperti Arab Saudi dan UEA telah memberikan bantuan dana dalam rangka memulihkan ekonomi Sudan.

F. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dalam memulihkan ekonomi pasca lepasnya Sudan selatan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional dalam diplomasi, dan HI di kawasan Timur Tengah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi kepustakaan yakni metode pengumpulan data maupun informasi yang didapat dari buku, jurnal, dokumen, website resmi, dan juga mengambil info dan data melalui sumber dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai permasalahan dan bahasan yang sama (Mirzaqon & Purwoko, (n.d.)).

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian dan materi-materi yang dimana diperoleh dengan cara literatur dan juga pencarian data melalui internet (Jatmika S. , 2016).

Penulis juga menggunakan metode deskriptif yang dimana tujuannya menjelaskan langkah-langkah atau cara dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Dan penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui langkah, cara atau upaya apa yang dilakukan pemerintah Sudan dalam memulihkan ekonomi pasca lepasnya Sudan selatan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I memuat pendahuluan yang diuraikan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dan juga akan dijelaskan gambaran umum terkait topik yang akan diteliti.

BAB II penulis menjelaskan tentang negara Sudan dari segi geografis, politik, ekonomi dan kebijakan pemerintah sebelum lepasnya Sudan Selatan.

BAB III memuat deskripsi tentang sejarah Sudan dan Sudan selatan serta fenomena konflik yang berkepanjangan ini sehingga menyebabkan krisis ekonomi di Sudan.

BAB IV berisi analisa tentang upaya-upaya dan peranan pemerintah Sudan dalam memulihkan ekonomi pasca lepasnya Sudan selatan.

BAB V sebagai penutup dan akhir dari penulisan penelitian mengenai kesimpulan yang telah dijabarkan dari BAB I sampai BAB V dan saran sebagai masukan dan perbaikan selama dilaksanakannya penelitian.